

EFEKTIVITAS PERUBAHAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)/INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS

THE EFFECTIVENESS OF THE STATUS CHANGE OF TEACHER TRAINING INSTITUTE INTO UNIVERSITY

Idris H.M Noor

Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud.

email: idrismnoor@yahoo.com

Diterima tanggal: 15/06/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 20/08/2013; Disetujui tanggal: 02/09/2013

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas perubahan status kelembagaan IKIP/LPTK ke universitas. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) dengan metode evaluasi dan metode studi kasus. Sampel menggunakan *stratified* dan *purposive sampling* dari delapan universitas negeri. Pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara, pengisian kuesioner. Analisis data menggunakan teknis kuantitatif dengan persentase dan analisis kasus melihat keunikan masing-masing prodi di masing-masing universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) universitas eks LPTK/ IKIP tetap menjalankan core bussines-nya sebagai produsen pendidik dan tenaga kependidikan, 2) peningkatan kompetensi keilmuan mahasiswa cukup efektif karena program studi pendidikan dan program studi murni saling mengisi satu sama lain, 3) peminat mahasiswa terus meningkat setiap tahunnya dengan calon mahasiswa yang berkualifikasi akademik tinggi, 4) menggunakan kurikulum pendidikan dan nonpendidikan, 5) kualifikasi dosen terus meningkat (pendidikan S1 terus berkurang, sedangkan S2 dan S3 terus bertambah), 6) biaya setiap universitas dan fakultas berbeda karena perbedaan tempat dan kebutuhan, dan 7) keluaran (*ouput*) lulusan mahasiswa memiliki IPK mencapai di atas rata-rata di atas 3.275.

Kata kunci: *efektivitas, perubahan, kompetensi, sumber daya manusia, status kelembagaan, program studi universitas*

Abstract: *The research investigates the effectiveness of the status change of teacher training institute into university. Research uses mixed quantitative and qualitative approach, evaluation and case study methods. sampling are stratified and purposive from eight public universities. Data collecting was Focus Group Discussion (FGD), kuessioner, and interview. Data analysis used percentage quantitative and case analysis of the unique of each study program at each university. The study shows: 1) universities are still keeping their roles as their core business to produce teachers and educational administrators, 2) Students competence significantly improves due to the education and non education program of the study reciprocally give or help each other as well as share their experience to enhance students' competence in science and social subjects, 3) the enrolement of students tends to be increased every year with high academic qualification candidates, 4) curriculum consists of education and non education (pure science and social subjects), 5) lecturers' qualification also increases significantly, srata 1 tends to be decrease, while master dan doctor degree-S2/S3 increase significantly every year/period, 6) budget of each university and faculty is different due to the different location of universities and needs of each faculty, and 7) students cummulative achievement index (3.275) increases every year;*

Keywords: *effectivity, change, institution, competence, human resource, institution status, study program, university*

Pendahuluan

Perguruan tinggi (universitas) mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan harus mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu bersaing dengan negara lain di era globalisasi. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)/Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai perguruan tinggi yang bertugas menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalisme calon-calon guru yang dihasilkan. Namun, berbagai asumsi mengenai mutu lulusan LPTK/IKIP selama ini masih rendah yaitu di bawah kompetensi lulusan-lulusan universitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rindjin (2008) mengenai guru sekolah menengah pertama (SMP), lulusan LPTK/IKIP dengan lulusan bukan yang berasal dari LPTK/IKIP yang mengajar bidang studi Matematika, IPA, Bahasa Indonesia (bukan-LPTK/IKIP) dan Bahasa Inggris terungkap bahwa tingkat kinerja guru SMP, baik di kelas VIII, kelas IX maupun kelas gabungan yang berlatar pendidikan universitas relatif lebih rendah dari guru yang berlatar pendidikan LPTK/IKIP. Guru yang berlatar belakang pendidikan LPTK/IKIP memiliki skor rerata kompetensi, motivasi kerja, dan sikap mengajar lebih rendah dari kompetensi guru yang berlatar bukan dari LPTK/IKIP. Sebaliknya, kompetensi pedagogik guru yang berasal dari LPTK/IKIP lebih tinggi dari skor rerata totalnya. Selain itu, latar belakang pendidikan LPTK/IKIP dan bukan LPTK/IKIP mempunyai kontribusi langsung terhadap sikap mengajar guru. Realitas seperti ini juga terjadi di Amerika seperti yang dikemukakan oleh Calderhead (1997) yang mengulas mengenai hasil-hasil penelitian efektivitas pengajaran di AS dalam rentang 15 tahun (1980-1995). Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan bidang pengajaran (*pedagogical content knowledge*) guru menjadi variabel amat penting dalam peningkatan mutu pengajaran.

Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan tersebut membuat pemerintah berpikir untuk mengubah status kelembagaan LPTK/IKIP menjadi universitas dengan harapan universitas tersebut akan mampu menghasilkan guru-guru

yang mempunyai kompetensi keilmuan yang lebih baik. Harapan itu direalisasikan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 93, Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen. Perubahan tersebut menetapkan status kelembagaan LPTK/IKIP menjadi universitas dan memberikan mandat yang lebih luas (*wider mandate*) ke LPTK/IKIP. Pada tahap pertama sesuai bunyi Pasal 1 ayat 2 Kepres Nomor 93, Tahun 1999 ditetapkan 6 (enam) IKIP berubah status menjadi universitas. Keenam IKIP tersebut adalah: IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya, IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang, IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar, IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, dan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

Selanjutnya, Pasal 2 Kepres Nomor 93, Tahun 1999 menetapkan bahwa universitas-universitas tersebut mempunyai tugas: a) menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu; dan b) mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan. Berdasarkan Kepres Nomor 93, Tahun 1999, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1499/D/1996 tanggal 20 Juni 1996 yang memberikan tugas yang lebih luas kepada LPTK/IKIP untuk menyelenggarakan pendidikan dan diperkuat melalui pengembangan ilmu dan melaksanakan pendidikan bidang nonkependidikan atau ilmu murni, teknik, maupun program profesi lainnya dalam rangka penguatan konten lulusan bidang kependidikan. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memperkuat eksistensi tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-profesi yang lainnya.

Berdasarkan isu-isu tersebut, secara singkat dikemukakan bahwa kebijakan perubahan status kelembagaan IKIP/LPTK menjadi universitas dilatarbelakangi oleh masalah rendahnya

kemampuan akademik guru yang berasal dari IKIP dibandingkan dengan kompetensi bidang akademik guru yang berasal dari universitas. Rumusan penelitian adalah: 1) bagaimana implementasi kebijakan nasional mengenai perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas?; 2) bagaimana profil mahasiswa di universitas eks LPTK/IKIP?; 3) bagaimana penataan kelembagaan yang dilakukan oleh universitas eks LPTK/IKIP?; 4) bagaimana kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat?; 5) bagaimana pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana)?; 6) bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh universitas eks LPTK/IKIP setelah perubahan?; dan 7) bagaimana keluaran (*ouput*) lulusan mahasiswa?

Berdasarkan permasalahan atau isu-isu yang dikemukakan tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam mengenai efektivitas perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas implementasi dari tujuan perubahan LPTK/IKIP ke universitas berdasarkan Kepres Nomor 93, Tahun 1999 tersebut. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai: 1) implementasi kebijakan nasional mengenai perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas; 2) profil mahasiswa di universitas eks LPTK/IKIP; 3) penataan kelembagaan yang dilakukan oleh universitas eks LPTK/IKIP; 4) kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat; 5) pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana); 6) pembiayaan yang dilakukan oleh universitas eks LPTK/IKIP setelah perubahan; dan 7) keluaran (*ouput*) lulusan mahasiswa.

Kajian Literatur

Hakikat Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tepat guna dan bermanfaat. Jadi, kata efektif berarti menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan atau sasaran dan harapan yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas sebuah program perlu diukur sejauh mana program yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan sehingga tujuan dapat tercapai. Sumaryadi (2005) berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas sebuah organisasi atau program dapat diketahui jika organisasi atau program tersebut dievaluasi mulai dari perencanaan, proses, pelaksanaan, kendala, dan cara mengatasi kendala, serta hasilnya (*output*). Pendapat yang sama diungkapkan oleh Donaldson dan Scriven (2003) yang mengatakan bahwa: *Findings from intervening mechanism evaluations inform a substantive area about why programs work or fail, for whom they work best, and what may be needed to make a program more effective*. Selanjutnya, Vedung (1997) dalam Donaldson dan Scriven (2003) menyatakan bahwa manajemen dilihat dari tiga ciri, yaitu: *thought to constitute good management practice: setting clear goals that refer to results, involving managers and staff in decision making, and frequently monitoring and evaluating the results*. Efektivitas sebuah program dapat dinilai dari kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan pengertian istilah evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya ditunjukkan dengan indikator-indikator tertentu. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menentukan efektivitas pelaksanaan program sesuai dengan rencana atau tidak.

Arikunto (2004) mendefinisikan evaluasi sebagai sebuah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Informasi tersebut digunakan sebagai opsi dalam mengambil keputusan. Konsep evaluasi juga dikemukakan oleh Lessinger dalam Gibson (1995) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Sementara itu, Mislevy and Knowles (2002) berpendapat bahwa: *evaluation are used to support inferences about the overall performance of the group and often to make*

statements about the effectiveness of a given program. Berdasarkan definisi dan konsep di atas, evaluasi program dilakukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program tercapai. Namun, perlu diingat bahwa makna dari kualitas sebuah program tergantung pada pandangan *stakeholders* yang melihat secara keseluruhan manfaat program tersebut bagi kepentingannya.

Evaluasi program merupakan sebuah kebijakan yang harus dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan program tersebut. Di samping itu, evaluasi program bermanfaat untuk menilai proses atau hasil sehingga perbaikan dapat dilakukan. Pelaksanaan evaluasi dapat didesain dan dilakukan selama program tersebut berjalan atau setelah selesai program tersebut dilaksanakan. Hinn and Lloyd (2001) berpendapat bahwa *quality is, after all, in the eye of the stakeholder. They seek a holistic understanding of program conditions.* Jadi, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya, evaluasi adalah sebuah program kebijakan untuk mengetahui keberhasilan program yang sudah dilaksanakan sehingga kelemahan dapat segera diatasi dan sebaliknya kekuatan atau keunggulan program tersebut dapat dipertahankan atau diperkuat. Ada beberapa kriteria untuk menganalisis kebijakan agar dapat berhasil seperti yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky (1993), yaitu: usaha menformulasikan masalah, mencari alternatif yang sudah usang, mengakui secara terang-terangan dan memberikan perlakuan tentang sesuatu yang tidak pasti dengan hati-hati, menguji hal-hal yang substansial, menetapkan pernyataan yang jelas tentang asumsi-asumsi, mencari data yang akurat, memilih dan mengembangkan model yang cocok, menjelaskan secara eksplisit penilaian yang subjektif, memperhatikan pertanyaan yang adil, membuat perencanaan awal, melihat dengan jelas lingkungan dan kelompok yang mungkin memberikan efek negatif, mencari biaya tak terduga, berkomunikasi secara intensif antara analis dengan klien, mempelajari dokumen dengan intensif, dan memperhatikan unsur moralitas.

Berdasarkan konsep dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keberhasilan, kegagalan dan kendala-kendala penyelenggaraan sebuah

kegiatan program. Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui keterlaksanaan suatu kebijakan (apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan atau belum).

Definisi dan Konsep Perubahan (*Change*)

Perubahan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang pendidikan mengarah pada kemajuan. Dalam bidang pendidikan, sering terjadi perubahan seperti perubahan kurikulum, metode pembelajaran, alat peraga, dan juga perubahan sebuah kebijakan. Pada prinsipnya, perubahan tersebut mengarah pada perbaikan dari sesuatu yang kurang atau tidak baik menjadi baik atau dari yang lemah menjadi kuat. Secara umum, konsep perubahan mengacu pada sebuah inovasi. Dalam bidang pendidikan inovasi merupakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik atau menjadikan sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik, dari sesuatu yang lemah menjadi kuat ataupun pengembangan dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks perubahan sebuah organisasi, konsep perubahan (*change*) merupakan reformasi yang mengarah pada pergantian, baik secara organisasi atau fisik maupun pergantian nonfisik seperti halnya perubahan dan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. White (1987) mendefinisikan inovasi sebagai: "... *more than change, although all innovation involves change*". Menurutnya, inovasi lebih dari sekedar perubahan. Ini menandakan bahwa sebuah inovasi lebih luas pengertiannya dari hanya sekedar perubahan.

Kelembagaan (*Organization*) dan Tata Kelola

Tata kelola lembaga universitas mengacu pada kebijakan manajemen organisasi. Kebijakan dalam mengelola lembaga seperti universitas mempunyai domain, khususnya mengenai sistem akademik. Dalam strategi manajemen, Barnett and Napoli (2008) mengatakan bahwa: *In managing strategy, an organisation exists to get something done and requires management while an institution is less concrete and is largely held together by people in the mind as part of their frame of reference.* Lebih

lanjut, Hopkins and Ainscow (1993) dalam Hunt, Bromage, and Tomkinson (2006) mengemukakan: *writing on change in higher education, offer the generalisation that change is typically facilitated by organisational cultures that are characterised by a consensus of values, willing collaboration and an orderly, secure environment where stakeholders are encouraged to take on leadership roles.*

Dalam perubahan pendidikan tinggi seperti universitas biasanya ada unsur lain yang ikut terlibat, seperti budaya, nilai-nilai, dan bekerja sama dengan pihak lain atau pengguna agar hasil atau produk organisasi tersebut berdaya guna sesuai dengan kebutuhan pemakai produk tersebut. Dalam kaitan itu, perubahan di universitas pasti mempengaruhi atau dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain sumber daya manusia. Dalam kaitan ini, penataan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) merupakan tanggung jawab individu dan juga sebuah organisasi. Berkaitan dengan pengembangan SDM, Wilson (2001) mengatakan bahwa: *human resource development (HRD) refers to learning at the individual, group, and organizational levels to enhance the effectiveness of human resources with the purpose of achieving the objectives of the organization.*

Pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengembangan kemampuan dosen di universitas merupakan suatu keharusan. Peningkatan kemampuan dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, antara lain melalui studi lanjut dan pelatihan, *workshop*, seminar, dan lain-lain. Salah satu cara yang perlu dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan kemampuan dosen adalah melalui studi lanjut. Program ini telah dicanangkan oleh setiap universitas, khususnya bagi dosen yang berpendidikan strata satu (S1) dan strata dua (S2). Peningkatan kemampuan dosen melalui studi lanjut bagi S1 merupakan suatu keharusan, karena menurut UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, seorang dosen yang mengajar di universitas harus berlatar belakang pendidikan minimal strata dua (S2). Bagi dosen yang sudah mendapat gelar S2 disarankan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata tiga (S3) atau program doktor. Lebih dari itu, bagi mereka yang sudah mendapat gelar S3

didorong untuk memperoleh gelar guru besar (profesor).

Kurikulum

Perubahan kurikulum merupakan salah satu inovasi atau perubahan (*change*). Perubahan kurikulum dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, khususnya kebutuhan mahasiswa. Perubahan kurikulum di universitas eks LPTK/IKIP merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan *wider mandate*, yang salah satunya adalah adanya program studi pendidikan dan program studi nonkependidikan (program studi murni).

Dalam perubahan kurikulum, aspek yang perlu diperhatikan adalah tujuan, isi, dan pelaksana kurikulum tersebut. Prinsip ini juga dikemukakan oleh O'Neill and Kitson (2002) yang berpendapat bahwa "*Curriculum policies should reflect the general aims of the school and should describe how the process, content, and organisation of each curriculum area contributes to the achievement of these aims*". Singkatnya, kebijakan kurikulum harus mengacu pada tujuan umum dari sekolah dan harus menguraikan proses, isi, dan organisasi masing-masing kurikulum dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan.

Hasil dari pembelajaran berdasarkan kurikulum yang didesain akan membawa efek yang besar, karena tanpa ada kesesuaian antara kebutuhan dan *demand* maka *outputnya* bisa terjadi *mismatch* antara keduanya.

Penelitian

Pengertian penelitian (*research*) adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Drew (1980 dalam Bell (1993) mengatakan bahwa: *research is conducted to solve problems and to expand knowledge and he stresses that research is a*

systematic way of asking questions, a systematic method of enquiry. Dengan demikian, penelitian harus dikerjakan menurut kaidah dan metode ilmiah/keilmuan secara objektif, logis, dan sistematis. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai ilmu atau interdisiplin.

Pengabdian kepada masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi merupakan salah satu dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (universitas). Program ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk, misalnya; pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari universitas yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tujuan program ini adalah menerapkan hasil-hasil universitas untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran.

Pembiayaan

Pembiayaan sebuah lembaga ditentukan oleh besarnya kebutuhan lembaga tersebut dan ketersediaan dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan sebuah institusi. Larry and SKousen (2009) mendefinisikan biaya: *a budget is a detailed financial plan that quantifies future expectations and actions relative to acquiring and using resources. Budgets don't guarantee success, but they certainly help to avoid failure.* Lebih lanjut, Larry and SKousen (2009) *said that some business unit have control over both costs and revenues and are therefore evaluated in their profit centers, "cost overruns" are expected if they are coupled with commensurate gains in revenue and profitability.* Berkaitan dengan pembiayaan tersebut, Campbell and Brown (2003) mengatakan bahwa *"the role of the benefit-cost analyst is to provide information to the decision-maker—the official who will appraise or evaluate the project."*

Berdasarkan konsep dan definisi *budget* tersebut dapat disimpulkan bahwa *budget* merupakan sebuah rencana anggaran atau finansial yang dibutuhkan untuk keperluan di masa datang. Untuk menjamin agar anggaran tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif maka perencanaan dan pengelolaan biaya mutlak

diperlukan. Untuk memberikan informasi mengenai penggunaan biaya pada penentu kebijakan maka diperlukan masing-masing unit di sebuah lembaga dapat mengalokasikan biaya sesuai dengan kebutuhan secara riil. Peran analisis biaya adalah sebagai informasi bagi penentu kebijakan.

Keluaran (Output) Lulusan Mahasiswa

Mutu menjadi isu utama dalam bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari pada visi, misi, dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan. Lisa, Laures, and Winters (Ed) (2005) mendefinisikan mutu pendidikan sebagai hasil pendidikan (*educational outcome*): *as student achievement, educational attainment, or subsequent wage earnings.* Dalam bidang pendidikan, mutu erat kaitannya dengan kegiatan dan hasil pendidikan. Tentu saja, agar kegiatan pendidikan dapat meningkatkan mutunya maka kegiatan pendidikan harus mengacu pada sebuah kebijakan pendidikan yang merupakan sebuah pernyataan komitmen yang disampaikan oleh institusi (Sallis, 2006).

Mutu pendidikan yang dikemukakan tersebut menjadi sebuah referensi pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan yang menghasilkan sebuah *output* yang dikehendaki, baik oleh pelaksana pendidikan maupun oleh *stakeholders* yang memanfaatkan hasil pendidikan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mutu lulusan atau mahasiswa tergantung daripada *input* mahasiswa, proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh pendidikan terhadap mahasiswa, dan *output* mahasiswa sebagai sebuah produk pendidikan itu sendiri. Produk tersebut harus mampu memenuhi keinginan *stakeholders*, dalam hal ini sekolah atau lembaga pendidikan lain yang menjadi penggunanya.

Prestasi akademik

Kemampuan intelektual mahasiswa sangat menentukan keberhasilannya dalam memperoleh prestasi. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Winkel (1996) mengatakan bahwa "prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seorang siswa dalam

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian prestasi merupakan hasil akhir dari proses pendidikan yang dilaksanakan dan prestasi akademik tersebut sebagai pengejawantahan dari akumulatif *input* dan proses penyelenggaraan pendidikan. Prestasi mahasiswa menunjukkan tingkat *output* dari hasil proses belajar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) dengan metode evaluasi dan metode studi kasus. Metode evaluasi digunakan untuk mendapatkan data secara kuantitatif, sedangkan metode kasus digunakan untuk mendapatkan data mengenai kasus-kasus dan keunikan di masing-masing universitas (Cresswell: 2010). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 selama 9 bulan mulai Februari sampai Oktober 2012 di 7 (tujuh) provinsi (8 universitas), yaitu 3 (tiga) provinsi di pulau Jawa dan 4 (empat) provinsi di luar pulau Jawa. Provinsi-provinsi tersebut adalah: Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta (DIY), dan Provinsi DKI Jakarta.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah 8 (delapan) universitas, yaitu: Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Singaraja, Bali, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Negeri Padang. Sumber data penelitian ini adalah: Rektor, Senat Fakultas, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program studi (prodi), Kepala dan staf Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Dosen, Kepala Bagian Kepegawaian (Kabag) Fakultas.

Pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara, dan pengisian kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 112 orang yang terdiri atas pejabat/dan mantan pejabat (rektor/senat), Kepala Biro, ketua/anggota

lembaga penelitian dan pengabdian sebanyak 40 orang (masing-masing 5 orang pejabat/mantan pejabat/senat dari delapan universitas), dekan sebanyak 24 orang, ketua jurusan sebanyak 24 orang, ketua program studi/dosen sebanyak 24 orang. Responden dipilih secara *purposif*, yaitu masing-masing 5 orang pejabat dari 8 (delapan) universitas negeri. Pemilihan responden dekan, ketua jurusan, dan ketua prodi/dosen ditentukan berdasarkan pada kriteria fakultas, jurusan, dan prodi yang paling banyak peminat, sedang, dan yang paling sedikit peminatnya di masing-masing universitas dari 6 (enam) universitas yang pertama berubah dari LPTK /IKIP menjadi universitas dan 2 (dua) universitas negeri yang berubah tahap selanjutnya.

Teknik pengumpulan data

Alat pengumpulan data penelitian adalah kuesioner, pedoman studi dokumentasi, pedoman *focus group discussion (FGD)*, dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui: pengumpulan informasi dengan cara meminta responden untuk mengisi kuesioner, menganalisis data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, melakukan FGD, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik kuantitatif dengan persentase dan analisis kasus. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mempresentasikan jawaban nara sumber (responden) dan dikualitatifkan dalam bentuk efektif, kurang efektif, atau paling efektif. Analisis kasus melihat keunikan masing-masing prodi di masing-masing universitas. Data yang sudah dikualitatifkan tersebut dibahas secara sistematis dengan cara menguraikan, mensintesis, membandingkan, mengkombinasikan, melakukan triangulasi data dengan hasil penelitian orang lain, dan memberikan komentar atau argumentasi, dan menyimpulkan. Data dari dokumen (*secondary data*) dan hasil FGD serta wawancara dianalisis dengan cara mendata, mengklasifikasi, mengurutkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Kedua data tersebut (*primary data* dan *secondary data*) dikombinasikan dan disimpulkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Nasional mengenai Perubahan LPTK/IKIP Menjadi Universitas

Universitas eks LPTK/ IKIP tetap menjalankan *core business*nya sebagai produsen pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberian perluasan mandat (*wider mandate*) pada universitas eks LPTK/IKIP untuk membuka program studi pendidikan dan program studi ilmu murni dalam rangka peningkatan kemampuan penguasaan bidang keilmuan bagi mahasiswa dan dosen secara umum dapat tercapai. Peningkatan kemampuan penguasaan bidang keilmuan dilakukan melalui sinergi pengembangan diri dosen dan mahasiswa program studi kependidikan dan program studi nonkependidikan (ilmu murni) secara simultan dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa salah satu tujuan perluasan mandat dalam peningkatan kompetensi lulusan/ produk universitas eks LPTK/IKIP secara umum telah dilaksanakan cukup efektif. Namun, koordinasi penyelenggaraan *wider mandate* pada tingkat fakultas dan program studi masih kurang.

Profil Mahasiswa di Universitas Eks LPTK/IKIP

Profil kemahasiswaan di universitas eks LPTK/IKIP. Dilihat dari empat hal: Pertama, sistem dan kriteria rekrutmen mahasiswa baru cukup baik. Hal ini terlihat dengan meningkatnya kualitas mahasiswa yang diterima di universitas eks LPTK/IKIP, karena universitas dapat memilih calon mahasiswa dengan kualifikasi akademik yang baik. Kedua, prospek masa depan guru yang lebih baik mendorong masyarakat memilih menjadi guru sebagai profesi sehingga mengakibatkan peminat mahasiswa yang masuk ke universitas eks LPTK/IKIP terus meningkat. Ketiga, mahasiswa yang masuk ke program studi pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan program studi pendidikan anak usia dini (PAUD) di setiap universitas paling banyak. Hal ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk menjadi pendidik, khususnya sebagai guru sekolah dasar terus bertambah. Kepercayaan masyarakat pada universitas eks LPTK/IKIP sebagai penyelenggara dan produsen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat. Keempat, kecenderungan meningkatnya minat mahasiswa memilih program

kependidikan terindikasi akibat dari adanya perhatian dan program pemerintah yang memberikan kesempatan pada guru untuk mendapatkan sertifikasi dan semakin meningkatnya perbaikan status guru. Pendapat ini diperoleh dari berbagai sumber dan hasil diskusi dengan para rektor dan dekan di berbagai universitas. Selain hasil diskusi dan wawancara, data dan informasi dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa peminat prodi pendidikan jauh lebih banyak dari peminat prodi nonkependidikan. Demikian juga daya tampung pada kedua prodi tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penataan Kelembagaan yang Dilakukan oleh Universitas eks LPTK/IKIP

Manajemen penataan kelembagaan universitas yang ditetapkan dalam peraturan dan keputusan dan pelaksanaannya dirinci dalam ketentuan Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud dapat dilaksanakan dengan baik. Penataan organisasi dan tata kelola (OTK), khususnya dalam pengisian dan mutasi jabatan di universitas dilakukan melalui mekanisme baku, namun masih ada ketentuan dan prasyarat yang berlaku di masing-masing universitas yang juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kurikulum, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, perubahan *wider mandate* mengenai pembukaan program studi (prodi) pendidikan dan prodi nonkependidikan (prodi ilmu murni) mengharuskan universitas mengubah dan menyesuaikan kurikulum di semua tingkat prodi, yaitu kurikulum pendidikan dan kurikulum nonpendidikan. Konten kurikulum direalisasikan dalam silabus di masing-masing prodi yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti sarana dan prasarana. Perubahan kurikulum didasarkan pada perubahan dasar kurikulum secara nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lulusan, karena tujuan pemberian *wider mandate* itu di antaranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya tuntutan pada lulusan universitas yang mampu menguasai bidang

keilmuan dan menguasai pembelajaran di sekolah. Kedua, penelitian dan pengabdian masyarakat secara kuantitas maupun kualitas bertambah. Pertambahan jumlah kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa. Namun, intensitas penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut belum maksimal.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan Sumber Daya Lainnya (Sarana dan Prasarana)

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana) terdiri atas 3 (tiga) hal. Pertama, peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM, khususnya dosen cukup efektif karena dosen-dosen yang berlatarbelakang pendidikan strata satu (S1) terus berkurang setiap tahun dan setiap periode. Hal ini disebabkan universitas terus mendorong dosen untuk studi lanjut karena ada ketentuan dan persyaratan bagi dosen harus berpendidikan minimal strata dua (S2). Dosen yang berpendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) terus bertambah karena universitas terus memprogramkan dosen untuk meningkatkan kemampuannya melalui studi lanjut ke program pascasarjana. Selain itu, guru besar terus bertambah. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas universitas. Kedua, keinginan dan motivasi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang *skill* dan kompetensi juga meningkat, namun masih terlihat intensitas pelatihan yang diikuti dan diselenggarakan oleh universitas, baik dilakukan sendiri oleh universitas maupun kerja sama dengan pihak lain dalam dan luar negeri masih kurang. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh setiap universitas dapat disimpulkan bahwa universitas bertekad untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas pembelajaran yang baik, khususnya dalam penggunaan sains dan teknologi.

Pembiayaan yang Dilakukan oleh Universitas Eks LPTK/IKIP setelah Perubahan

Sumber biaya dan penggunaannya di masing-masing universitas yang bervariasi menandakan adanya kebutuhan dan program masing-masing universitas yang berbeda-beda. Pada tingkat universitas pun terjadi perbedaan pembiayaan dan penggunaan di antara fakultas dan program studi. Kesenjangan pembiayaan di antara universitas, fakultas, dan prodi dalam satu universitas diakibatkan oleh perbedaan tempat, wilayah, kebutuhan, dan prioritas penyelenggaraan *wider mandate* dalam perubahan kelembagaan LPTK/IKIP ke universitas.

Keluaran (*ouput*) lulusan mahasiswa

Ada kaitan antara peminat dan daya tampung program studi dan keluaran (*output*) pada program studi pendidikan dan nonkependidikan di hampir semua universitas. Tingginya peminat untuk prodi pendidikan di semua universitas menandakan bahwa masyarakat semakin berminat untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Minat masyarakat yang tinggi untuk masuk ke universitas eks IKIP/LPTK saat ini karena membaiknya status guru di masyarakat secara ekonomi. Salah satu penyebab adanya perbedaan jumlah lulusan program studi pendidikan dengan jumlah lulusan program studi nonkependidikan adalah jumlah peminat dan *input* serta daya tampung mahasiswa program studi pendidikan jauh lebih besar dari program studi nonkependidikan. Lulusan (*output*) mahasiswa cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan lulusan ketika masih berstatus IKIP. Salah satu indikatornya adalah rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan universitas eks LPTK/IKIP sudah mencapai di atas tiga (3.275). Di samping itu, hasil dari *focus group discussion* (FGD) dan wawancara dengan para rektor di beberapa universitas mengatakan bahwa mutu lulusannya lebih tinggi dilihat dari implementasi keilmuan dan sosial masyarakat di masyarakat dan mampu menjalankan kehidupan secara efektif dalam bermasyarakat.

Pembahasan Hasil Penelitian

Universitas eks LPTK/ IKIP tetap menjalankan *core businessnya* sebagai produsen pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi keilmuan mahasiswa cukup efektif, karena program studi pendidikan dan program studi murni saling sinergi mengisi satu sama lain. Namun, koordinasi penyelenggaraannya pada tingkat fakultas dan program studi masih kurang. Hasil wawancara dan FGD serta kondisi empirik yang diobservasi menunjukkan masih belum efektif penuh atau 100%, karena keuntungannya masih belum dirasakan oleh setiap akademika. Jika perubahan tersebut masih belum sepenuhnya mencapai peningkatan mutu yang ditetapkan dalam rencana universitas atau target yang telah ditetapkan, maka perubahan tersebut belum bisa dikatakan efektif penuh. Penilaian dan evaluasi mengenai alasan mengapa program dilihat sukses atau gagal juga diungkapkan oleh Donaldson and Scriven (2003) yang mengatakan bahwa *findings from intervening mechanism evaluations inform a substantive area about why programs work or fail, for whom they work best, and what may be needed to make a program more effective*. Pendapat ini dimaknai sebagai temuan dari intervensi mekanisme evaluasi yang memberikan informasi penting terhadap keberhasilan atau kegagalan program dan apa yang diperlukan agar program tersebut bisa lebih efektif.

Peminat mahasiswa yang masuk ke setiap universitas eks LPTK/IKIP terus meningkat setiap tahunnya terutama prodi pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan prodi pendidikan anak usia dini (PAUD). Besarnya peminat tersebut membuat universitas memilih calon mahasiswa dengan kualifikasi akademik yang baik. Kecenderungan meningkatnya minat mahasiswa memilih program kependidikan terindikasi dari akibat adanya perhatian dan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan sertifikasi dan semakin meningkatnya perbaikan status guru. Meningkatnya minat mahasiswa terhadap program tertentu diakibatkan adanya kebutuhan yang diharapkan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan konsep minat dan motivasi yang dikemukakan oleh Denny (2009) yang mengatakan bahwa: *motivation is getting somebody to do some thing because they*

want to do it. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap program PGSD dan PAUD diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap program studi tersebut, agar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada kedua tingkat pendidikan tersebut terpenuhi.

Penataan organisasi dan tata kelola (OTK), khususnya dalam pengisian dan mutasi jabatan dilakukan melalui mekanisme baku dan dibahas dalam sidang senat universitas dengan berpedoman pada ketentuan dan mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjarit). Hal ini sesuai pendapat Hopkins and Ainscow (1993) dalam Lynne, Bromage, and Tomkinson (2006) tentang perubahan dan tata kelola lembaga universitas yang menyatakan bahwa: *on change in higher education, offer the generalisation that change is typically facilitated by organisational cultures that are characterised by a consensus of values, willing collaboration and an orderly, secure environment where stakeholders are encouraged to take on leadership roles*. Konsep seperti yang dikemukakan ini secara umum dapat dimaknai bahwa perubahan kurikulum di perguruan tinggi tentu diatur oleh budaya organisasi dengan prinsip konsensus terhadap nilai-nilai kerja sama dan adanya rasa aman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakannya.

Kurikulum yang digunakan meliputi kurikulum pendidikan dan kurikulum nonpendidikan. Tujuannya adalah agar kurikulum tersebut lebih efektif dan bermanfaat sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa. Perubahan kurikulum IKIP/ LPTK menjadi kurikulum universitas harus dikelola dengan baik dan memerlukan dukungan berbagai elemen khususnya para ahli kurikulum sehingga kurikulum tersebut efektif. Perubahan kurikulum yang demikian juga dikemukakan oleh Briggs and Sommefeldt (2002) yang menyarankan: *Managing curriculum change effectively requires those offering advice and from these generalist, specialist and negotiating roles according to the stage of a teacher's development*. Perubahan kurikulum memerlukan saran dari para ahli dan harus sesuai dengan peran dan perkembangan guru.

Selain itu, O'Neill (2002) berpendapat bahwa *"the appropriate balance between content and process, and how to ensure consistency in terms of*

access, continuity and coverage". Salah satu karakteristik efektivitas sebuah organisasi adalah tingginya kemampuan sumber daya manusia seperti dosen yang bertugas sebagai pendidik dan pengajar di universitas dan semua civitas akademika termasuk tenaga administrasi atau tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi dosen setelah menjadi universitas cukup efektif karena dosen-dosen yang berlatarbelakang pendidikan strata satu (S1) terus berkurang setiap tahun dan setiap periode, sedangkan dosen yang berpendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) terus bertambah. Konsepsi ini sama dengan pendapat Steers (1980) yang mengatakan bahwa anggota organisasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh, karena perilaku mereka dalam jangka panjang akan memper-lancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi, yaitu meningkatnya kompetensi keilmuan para lulusan universitas tersebut.

Pembiayaan (sumber biaya dan penggunaannya) di masing-masing universitas bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing universitas. Perbedaan ini karena kebutuhan dan prioritas penggunaannya berbeda walaupun dana berasal dari sumber yang sama, yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tujuan pembiayaan secara umum adalah untuk membiayai kebutuhan universitas agar peningkatan mutu lulusan tercapai, seperti yang dikemukakan oleh Larry and Skousen (2009) *"A budget is a detailed financial plan that quantifies future expectations and actions relative to acquiring and using resources. Budgets don't guarantee success, but they certainly help to avoid failure"*.

Produk (*output*) mahasiswa cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan lulusan ketika masih berstatus IKIP. Salah satu indikatornya adalah rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan universitas eks LPTK/IKIP sudah mencapai di atas tiga (3.275) dan setiap tahunnya meningkat. Di samping itu, lulusan program studi pendidikan di hampir semua universitas jauh lebih banyak dari lulusan program studi nonkependidikan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh *input* mahasiswa yang masuk di fakultas atau prodi tertentu dan juga proses pembelajarannya yang lebih baik. Dampak dari *input* dan proses yang baik dapat dipastikan akan menghasilkan keluaran

(*output*) yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Winkel (1996) yang mengatakan bahwa prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang secara maksimal setelah berusaha belajar dengan rajin. Ini membuktikan bahwa IPK yang merupakan ukuran keberhasilan belajar mahasiswa merupakan sebuah *output* yang baik terhadap proses pembelajaran.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 7 (tujuh) hal. Pertama, implementasi kebijakan nasional mengenai perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas efektif. Hal ini ditunjukkan bahwa pemberian perluasan mandat (*wider mandate*) pada universitas-universitas tersebut untuk membuka program studi pendidikan dan program studi ilmu murni dalam rangka meningkatkan kemampuan penguasaan bidang keilmuan bagi mahasiswa dan dosen berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari aktifnya interaksi antara mahasiswa dan dosen pada kedua prodi dalam membagi pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Namun, koordinasi penyelenggaraan *wider mandate* pada tingkat fakultas dan program studi masih kurang.

Kedua, kualifikasi akademik calon mahasiswa di universitas eks LPTK/IKIP makin meningkat karena: 1) sistem dan kriteria rekrutmen mahasiswa baru makin baik; 2) masyarakat cenderung bertambah banyak untuk melanjutkan pendidikan di universitas eks LPTK/IKIP karena prospek masa depan guru yang lebih baik; dan 3) program studi PGSD dan PAUD di setiap universitas paling diminati oleh mahasiswa karena adanya perhatian pemerintah dalam perbaikan status guru seperti program sertifikasi guru. Pendapat ini diperoleh dari berbagai sumber dan hasil diskusi dengan para rektor dan dekan di berbagai universitas. Selain itu, prodi pendidikan masih menjadi prodi yang sangat diminati oleh mahasiswa daripada prodi nonkependidikan, dan daya tampung pada kedua prodi tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Ketiga, penataan organisasi dan tata kelola (OTK) khususnya dalam pengisian dan mutasi

jabatan di universitas dilakukan melalui mekanisme baku di samping pertimbangan ketentuan dan prasyarat masing-masing universitas. Perubahan *wider mandate* untuk membuka program studi (prodi) pendidikan dan prodi nonkependidikan (prodi ilmu murni) berdampak pada perubahan dan penyesuaian kurikulum dan silabus berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana.

Keempat, perubahan kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu lulusan dituntut untuk mampu menguasai bidang keilmuan dan menguasai pembelajaran di sekolah. Penelitian dan pengabdian masyarakat secara kuantitas maupun kualitas bertambah, karena ada tuntutan peningkatan implementasi tridharma perguruan tinggi bagi dosen dan mahasiswa walaupun intensitas penyelenggaraannya belum maksimal.

Kelima, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) terus meningkat seperti dosen-dosen yang berlatarbelakang pendidikan S1 terus berkurang setiap tahun dan setiap periode, sebaliknya dosen yang berpendidikan S2 dan S3 serta guru besar terus bertambah. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas universitas. Namun pada sisi lain, intensitas pelatihan keterampilan bidang manajemen dan keilmuan serta seminar masih kurang. Universitas juga terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas pembelajaran yang baik khususnya dalam penggunaan sains dan teknologi.

Keenam, sumber biaya dan penggunaannya di masing-masing universitas bervariasi, karena kebutuhan dan program masing-masing universitas yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan tempat, wilayah, kebutuhan, dan prioritas masing-masing universitas.

Ketujuh, terkait dengan lulusan (*ouput*) mahasiswa dapat disimpulkan bahwa: 1) ada kaitan antara peminat dan daya tampung program studi dan keluaran (*output*) di hampir semua universitas. Tingginya peminat untuk prodi pendidikan di semua universitas menandakan bahwa masyarakat semakin berminat untuk menjadi tenaga pendidik dan kependidikan. Minat

masyarakat yang tinggi saat ini karena membaiknya status guru di masyarakat secara ekonomi. Salah satu penyebab adanya perbedaan jumlah lulusan program studi pendidikan dengan jumlah lulusan program studi nonkependidikan adalah jumlah peminat dan *input* serta daya tampung mahasiswa program studi pendidikan jauh lebih besar dari program studi nonkependidikan, 2) hasil atau produk (*output*) mahasiswa cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan lulusan LPTK/IKIP ketika masih berstatus IKIP. Salah satu indikatornya adalah rata-rata IPK lulusan universitas eks LPTK/IKIP sudah mencapai di atas tiga (3,275). Di samping itu, hasil dari *focus group discussion* (FGD) dan wawancara dengan para rektor di beberapa universitas yang mengatakan bahwa mutu lulusannya lebih tinggi dilihat dari implemementasi keilmuan dan sosial masyarakat di masyarakat dan mampu menjalankan kehidupan secara efektif dalam bermasyarakat.

Saran Kebijakan

Berdasarkan simpulan di atas, makan dapat disampaikan 7 (tujuh) saran kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan nasional mengenai perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas efektif, Kemdikbud perlu membuat ketentuan yang jelas tentang pembukaan prodi bagi universitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat agar tidak terjadi kelebihan lulusan (*overproduction*) dan lulusan prodi yang dibuka dapat memenuhi kebutuhan dan tidak menjadi beban masyarakat. Selain itu, Kemendikbud perlu mengetatkan pemberian ijin bagi pembukaan universitas swasta yang tidak memenuhi persyaratan dan mengakibatkan mutu lulusan yang akan menjadi guru rendah dan tidak berkualitas. Universitas perlu memperkuat dan meningkatkan kinerjanya melalui penyelenggaraan *wider mandate* secara berkelanjutan dan memperbaiki kelemahan dan kekurangan melalui peningkatan kemampuan kinerja dan kompetensi semua civitas akademika.

Kedua, untuk meningkatkan kualifikasi akademik calon mahasiswa di universitas eks LPTK/IKIP, universitas perlu meningkatkan dan memperketat penjurangan calon mahasiswa yang betul-betul memenuhi kriteria calon guru yang tidak hanya dilihat dari kemampuan akademik atau

bukan hanya ditekankan bidang studi, melainkan juga ditekankan minat, motivasi, psikologi, dan kesehatan fisik sebagai syarat seorang guru yang berwibawa. Universitas juga perlu mengisi jabatan di fakultas, jurusan, dan prodi dengan menggunakan kriteria yang lebih menjamin kualitas penyelenggaraan kegiatan, khususnya mengenai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, universitas perlu peningkatan kemampuan lulusan, bukan hanya pada saat mereka di universitas, melainkan juga *on going training* melalui penelusuran (*treasure*) studi di masyarakat seperti sekolah. Hal ini diperlukan agar universitas dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu lulusannya.

Ketiga, dalam memperkuat organisasi, universitas perlu mengatur manajemen penataan organisasi dan tata kelola (OTK), khususnya dalam pengisian dan mutasi jabatan di universitas.

Keempat, konten kurikulum sebaiknya lebih menekankan pada peningkatan kompetensi keilmuan dalam bidang sains dan teknologi. Untuk konten bidang sosial dan bahasa perlu diintegrasikan dengan sains dan teknologi agar daya saing lulusan di masyarakat mampu berkompetisi, baik secara nasional maupun internasional

terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

Kelima, peningkatan pendidikan dosen dan tenaga kependidikan perlu didukung dengan kebijakan pemberian beasiswa yang lebih terarah pada dosen sesuai dengan tugas yang akan diembanya sebagai pengampu mata kuliah.

Keenam, pembiayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan universitas di masing-masing wilayah tempat universitas berada, misalnya: di daerah yang belum ada bidang keilmuan tertentu yang dibutuhkan masyarakat harus diberi bantuan yang biaya yang cukup untuk membiayai kebutuhan universitas, terutama program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar universitas.

Ketujuh, untuk meningkatkan lulusan (*ouput*) mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa harus diampu oleh dosen-dosen yang mempunyai keahlian khusus dan berkomitmen tinggi. Selain itu, sarana seperti penguatan IT dan bahan ajar seperti *e-book* harus tersedia dan mahasiswa diberi kemudahan untuk mengakses bahan bacaan tersebut.

Pustaka Acuan

- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Barnett Ronald and Roberto De Napoli. 2008. *Changing Identities in Higher Education Voicing Perspectives*. 270 Madison Ave, New York, NY 10016.
- Bell, Judith. 1993. *Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education and Social Science*. Open University Press. Buckingham.
- Briggs, Ann R.J. and Daniela Sommefeldt. 2002. *Managing Effective Learning and Teaching*. Paul Chapman Publishing. Paul Chapman Publishing A SAGE Publications Company 6 Bonhill Street London EC2A 4PU.
- Calderhead, James and S.B. Shorrock. 1997. *Understanding Teacher Education Case Studies in the Professional Development of Beginning Teachers*. The Falmer Press, Taylor & Francis Inc., 1900 Frost Road, Suite 101, Bristol, PA 19007. Washington, D.C.
- Campbell, Harry F. and Richard P. C. Brown. 2003. *Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Appraisal using Spreadsheets*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Cresswell John.W. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Third Edition. Osage publications. Thousand Oaks California 91320. 2009. Terjemahan. Ahmad Fawaid. Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur UH III/548, Yogyakarta.

- Denny, Richard. 2009. *Motivate to Win*. Kogan Page Limited 120 Pentonville Road London N1 9JN United Kingdom USA.
- Donaldson, Stewart I and Michael Scriven. 2003. *Evaluating Social Programs and Problems* Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 10 Industrial Avenue Mahwah, NJ 07430, Publishers 2003 Mahwah, London.
- Gibson, J.L, Ivancevich and Donnelly. 1995. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta: Erlangga
- Hinn, D. M Benson, A, and Lloyd, C (Editor). 2001. *Visions of Quality: How Evaluators Define, Understand and Represent Program Quality*. Elsevier Science Lid The 8ou, L.An & Ford Line Kidliq & DII, Otford Oxlig B, UK.
- Hunt, Lynne, Adrian Bromage and Bland Tomkinson. 2006. *The Realities of Change in Higher Education. Interventions to promote learning and teaching*. Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016.
- Larry, Walther M. & Cristopher J. SKousen. 2009. *Budgeting and Decision Making*. Cristopher J. SKousen Publishing ApS. WWW.Bookboon.com.
- Lisa, Wise, Laress L. and Winters. Tina M., (Editors). 2005. *Advancing Scientific Research in Educatio*. Center for Education Division of Behavioral and Social Sciences and Education, National Academies Press, 500 Fifth Street, N.W., Lockbox 285, Washington, DC 20055.
- Lynne Hunt, Adrian Bromage and Bland Tomkinson (ed) 2006. *The Realities of Change in Higher Education*. Taylor & Francis e-Library, Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016.
- Mislevy, R.J. and Knowles, K.T., (editors) 2002. *Performance Assessments for Adult Education Exploring the Measurement Issues*. The National Academy of Sciences. National Academy Press 2101 Constitution Avenue, NWBox 285 Washington, DC 20055.
- O'Neill. J and Neil. Kitson (Ed) 2002. *Effective Curriculum Management*. Taylor & Francis e-Library, New York.
- Patton, Carl, V,& David S.Sawicky. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, London: Prentice Hall.
- Rindjin, Ketut. 2008. *Studi Perbandingan Guru SMP Lulusan universitas dengan Non- LPTK/IKIP Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Bekerja Sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*.
- Steers, M, dan Richard (1980:192) (<http://jurnal-sdm.blogspot.com>).
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang IKIP sebagai lembaga penyedia tenaga pendidik telah berubah menjadi universitas.
- Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, Nomor 1499/D/1996 pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta dan 3 IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.
- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality managemen in Education: Manajemen Mutu Pendidikan IRCiSoD*, Yogyakarta.

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Penerbit Citra Utama
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- White, R.V. 1987. *The ELT Curriculum: Design. Innovation and Management*. Oxford: Blackwell.
- Wilson, John P (ed). 2001. *Human Resource Development. Learning and Training for Individuals and Organizations*. Kogan Page Limited 120 Pentonville Road London N1 9JN.
- Winkel, W.S. 1996. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.